PEMERINTAH KOTA YOGYAKARTA
DINAS KOMUNIKASI, INFORMATIKA DAN PERSANDIAN
Jalan Kenari No. 56 Yogyakarta, KodePos 55165 Telp. (0274) 515865, 562682
EMAIL : kominfosandi@jogjakota.go.id
HOTLINE SMS : 081 2278 0001; HOTLINE EMAIL: upik@jogjakota.go.id;
WEBSITE : www.jogjakota.go.id

Media: Republika Hari: Selasa Tanggal: 22 September 2020 Halaman: 8

Kabupaten/Kota DIY Diminta Tunda Verifikasi Destinasi Wisata

■ SILVY DIAN SETIAWAN

SLEMAN — Kabupaten/kota se-DIY diminta untuk menunda proses verifikasi terhadap destinasi wisata. Hal ini dikatakan oleh Dinas Pariwisata DIY, Singgih Raharjo, mengingat kasus terkonfirmasi positif Covid-19 yang masih melonjak di DIY.

Bahkan, kasus terkonfirmasi positif sudah ditemukan di kawasan wisata. Salah satunya di kawasan Malioboro, Yogyakarta. "Kita juga mengimbau kabupaten/kota untuk meningkatkan kewaspadaan terhadap usaha pariwisata yang punya risiko tinggi untuk dilakukan penundaan verifikasi terlebih dahulu," kata Singgih, di Royal Ambarukmo Hotel, Sleman, Senin (21/9).

Ia menyebut, sudah ada 90 destinasi wisata yang diverifikasi sejak diterapkannya uji coba operasional pariwisata secara terbatas dan bertahap. Pihaknya pun tidak meminta kab/kota untuk menutup destinasi wisata yang sudah terverifikasi.

"Penundaan verifikasi artinya belum dilakukan uji coba operasional terbatas. Untuk yang sudah diverifikasi biarkan berjalan, tapi diiringi dengan monitoring dan evaluasi," ujarnya.

Dikatakan, rombongan wisatawan dalam jumlah besar belum dapat masuk kawasan wisata di DIY. Wisatawan dari zona merah Covid-19 juga harus menyertakan hasil rapid diagnostic test (RDT) atau swab Covid-19.

"Yang masuk destinasi maksimal 50 persen. Kemudian dalam Pergub (DIY), dari zona merah itu disebutkan untuk membawa surat keterangan sehat atau rapid test dengan hasil non reaktif," jelasnya.

Selain itu, penerapan protokol kesehatan pencegahan Covid-19 harus dilakukan secara ketat. Baik pengelola destinasi wisata, pelaku usaha pariwisata maupun wisatawan.

"Ini harus jadi kebiasaan baru kita, pengelola Malioboro juga jangan mengandalkan petugas (yang berpatroli). Kita tidak bisa menaruh harapan kepada petugas karena sangat terbatas. Yang perlu didorong adalah kesadaran masyarakat untuk menerapkan kebiasaan baru," kata Singgih.

Terpisah, Wakil Ketua DPRD DIY, Huda Tri Yudiana, meminta Sisa Lebih Perhitungan Anggaran (SILPA) dalam perubahan APBD 2020 agar dialokasikan untuk penanganan Covid-19. Dana SILPA ini mencapai Rp 7,3 miliar di Anggaran Biaya Tambahan (ABT) dalam APBD 2020.

"Meskipun BTT (Belanja Tak Terduga) untuk Covid-19 sudah sekitar Rp 600 miliar, badan anggaran (DPRD DIY) tetap minta ditambahkan agar tidak ada alasan kekurangan anggaran dalam penanganan Covid-19," ujarnya.

Huda menjelaskan, kondisi penyebaran Covid-19 di DIY belum stabil dan status Tanggap Darurat Bencana Covid-19 masih diberlakukan. Sehingga, dana SILPA ini dapat dialokasikan untuk penanganan Covid-19 d DIY agar lebih optimal.

■ ed: yusuf assidiq

Instansi	Nilai Berita	Sifat	Tindak Lanjut
1.	Netral	Biasa	Untuk Diketahui

Yogyakarta, 22 Juni 2026
Kepala

Ig. Trihastono, S.Sos. MM
NIP. 19690723 199603 1 005